

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SEBAGAI ALAT PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Budy Wiryawan, Akhmad Solihin dan Irfan Yulianto

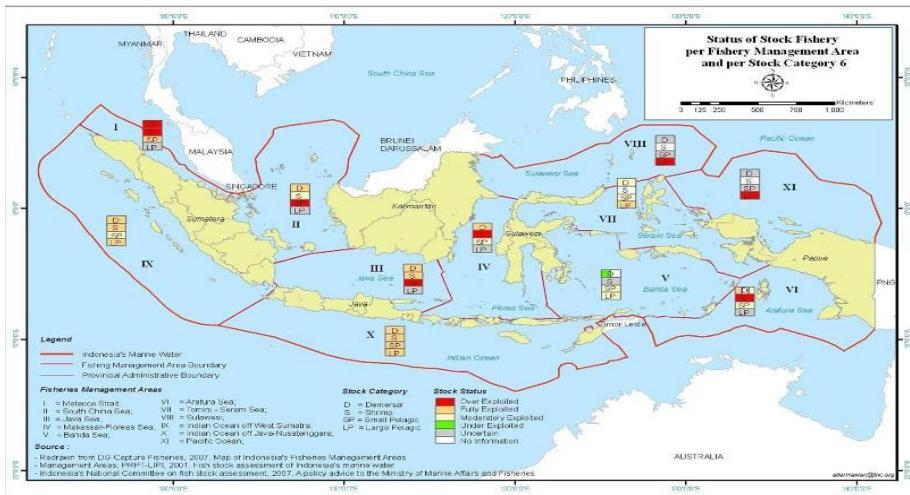
PENDAHULUAN

Berdasarkan data terakhir, FAO mengindikasikan telah terjadi gejala tangkap lebih (*overfishing*) pada skala internasional yang semakin meluas, yaitu 16% *over exploited* dan 44% *fully exploited* (Fontaubert & Lutchman, 2003). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian terakhir yang mengungkapkan bahwa banyak stok ikan sudah mengalami penurunan secara terus menerus sejak pertama kali ditangkap dan populasi ikan berkurang 80% dalam 15 tahun sejak pertama kali dieksploitasi (Myers & Worm 2003). Bahkan, hasil riset Worm *et al.* (2006) mengungkapkan bahwa pada tahun 2048 akan terjadi kehancuran perikanan global. Namun demikian, dua tahun kemudian pendapat Worm tersebut dibantah oleh Branch (2008), karena dianggap mengabaikan berbagai faktor, salah satunya adalah regulasi internasional dan nasional dalam mewujudkan perikanan dunia yang berkelanjutan.

Terlepas dari perdebatan para pakar tersebut di atas, pengelolaan perikanan adalah hal yang harus menjadi perhatian bersama. Mengingat, perikanan tangkap dunia menunjukkan kontribusi yang makin besar terhadap total produksi perikanan dunia. Berdasarkan data FAO, produksi perikanan laut dunia berfluktuasi antara 77 dan 86 juta ton dengan catatan tertinggi 86,8 juta ton pada tahun 2000 dan menurun menjadi 79,9 juta ton pada tahun 2009 (FAO 2010). Dengan demikian, potensi perikanan tangkap dunia semakin menunjukkan angka penurunan.

Tingginya tingkat produksi perikanan tangkap dunia terjadi juga di Indonesia. Kenaikan produksi perikanan tangkap di laut sepanjang tahun 2005 hingga 2009 sebesar 2,11%, yaitu pada tahun 2005 sebesar 4.408.499 ton bertambah menjadi 4.789.410 pada tahun 2009. Jika dibandingkan dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton, maka produksi tahun 2009 telah mencapai 93,55% dari JTB. Oleh karenanya sangat

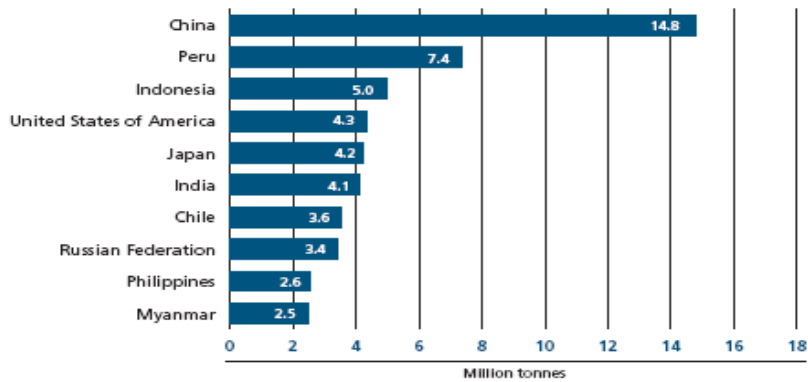
wajar, bila beberapa wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Republik Indonesia mengalami overfishing yang ditandai dengan warna merah (Gambar 1).



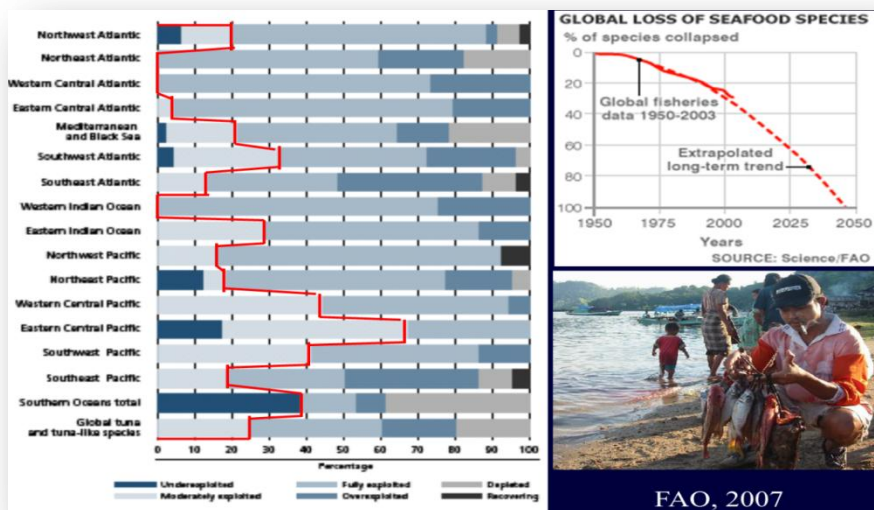
Gambar 1 Status sumberdaya ikan di Indonesia

Tingginya produksi perikanan Indonesia menempati urutan ketiga dari 10 produsen perikanan dunia. Hal ini sebagaimana laporan FAO *"the State of World Fisheries and Aquaculture 2010"* (Gambar 2). Oleh karena itu, pengelolaan perikanan harus senantiasa menjadi perhatian bangsa Indonesia.

Sementara di tingkat regional, Gambar 3 menunjukkan kondisi daerah penangkapan ikan yang cenderung *"fully dan over exploited"*. Daerah penangkapan Western Central Pacific dan Eastern Indian Ocean misalnya, dimana armada Indonesia melakukan penangkapan ikan, kondisinya sebagian besar adalah *moderately exploited*. Oleh karenanya, pengembangan kawasan konservasi untuk Indonesia sangatlah diperlukan untuk menjamin perikanan berkelanjutan.



Gambar 2 10 negara produksi perikanan terbesar tahun 2010 (FAO 2010)



Gambar 3 Kondisi perikanan dunia dan proyeksi tahun 2050

Dalam rangka menunjukkan kepedulian Indonesia di mata internasional terhadap konservasi perairan, maka pemerintah Indonesia bertekad membentuk kawasan konservasi perairan seluas 10 juta hektar sampai tahun 2010. Target tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada *COP-8 Convention on Biological Diversity (CBD)* di Brazil tahun 2006, yang akan memperluas kawasan konservasi perairan hingga 20 juta hektar pada akhir tahun 2020. Hingga tahun 2010, target 10 juta hektar tersebut telah dicapai oleh Pemerintah Indonesia. Namun demikian, upaya konservasi perairan

tidak cukup berhenti pada target luasan kawasan konservasi, karena tantangan berikutnya adalah bagaimana mengefektifkan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan untuk pengelolaan perikanan.

Melihat pentingnya Kawasan Konservasi Perairan untuk mendukung perikanan berkelanjutan dan penanganan masalah penurunan stok ikan dunia, maka Sekretaris Jenderal FAO membuat pernyataan resmi pada Hari Lingkungan Hidup pada tahun 2004, bahwa 75% daerah penangkapan ikan di dunia menunjukkan laju eksploitasi lebih cepat dibandingkan laju rekrutmen. Harapan perikanan di negara-negara tropis ada pada kawasan terumbu karang memiliki fungsi perikanan, yaitu sebagai tempat hidup ikan ekonomis penting dan menghasilkan 8-18 ton/tahun per km².

PERIKANAN BERKELANJUTAN

Terminologi perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) berasal dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dipopulerkan oleh *Brundtland Report* dalam pertemuan WCED tahun 1987. Dalam laporan tersebut, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan menjelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan serta menerangkan implikasi dibaliknya, Komisi Brundtland kemudian mengidentifikasi tujuh tujuan penting untuk kebijakan pembangunan dan lingkungan. Ketujuh tujuan tersebut, yaitu meliputi 1) memikirkan kembali makna pembangunan; 2) mengubah kualitas pertumbuhan (lebih menekankan pada pembangunan dari pada sekedar pertumbuhan); 3) memenuhi kebutuhan dasar akan lapangan kerja, makanan, energi, air dan sanitasi; 4) menjamin terciptanya keberlanjutan pada satu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu; 5) mengkonversi dan meningkatkan sumber daya; 6) mengubah arah teknologi dan mengelola resiko; dan 7) memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.

Menindaklanjuti publikasi *Our Common Future*, banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip pembangunan